

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH  
(Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Propinsi Banten Tahun 2012 - 2015)

**Rakhmini Juwita**  
**Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka**  
**rakhmini@ut.ac.id**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD yang sah) terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah Propinsi Banten. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksplanatori, dengan menggunakan metode *non probability sampling* pada 9 pemerintah daerah di pemerintahan daerah Propinsi Banten. Data yang digunakan yaitu data realisasi anggaran dari tahun 2012 – 2015, analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah dan retribusi daerah mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan sebesar 84.6% terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Propinsi Banten. Hal ini berarti bahwa semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah propinsi Banten.

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Dalam rangka melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sistem pemerintahan daerah di Indonesia menjalankan pemerintahannya dengan prinsip otonomi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur pemerintahan daerah sendiri yang telah diatur oleh undang-undang, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perwujudan dari otonomi daerah dalam segi pengelolaan keuangan pemerintah daerah menggunakan prinsip desentralisasi fiskal, dimana kewenangan pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan pemerintah. Keuangan daerah tergantung dari pendapatan daerah karena meningkatnya pendapatan daerah maka akan meningkatkan penghasilan daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat, untuk itu sektor pendapatan daerah sangat diutamakan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah bersumber dari wilayah daerah sendiri dan dipungut oleh daerah sendiri sehingga PAD ini merupakan wujud dari desentralisasi fiskal. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka semakin kecil ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pemasukan utama Pemerintah Provinsi Banten dengan andil mencapai 71% dari total pendapatan. Dalam hal ini, pajak daerah memiliki kontribusi paling besar yakni 67% dari total Pendapatan Asli Daerah (<http://kabar24.bisnis.com/read/20141202/78/379197/realisasi-pendapatan-banten-rp498-triliun>). Pengelolaan pendapatan asli daerah pemerintah harus dilakukan secara efektif dan efisien, karena sebagian besar dana tersebut bersumber dari dana masyarakat, sehingga perlu adanya transparansi publik untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pertanggungjawaban keuangan pemerintah sangatlah penting karena dengan adanya pertanggungjawaban tersebut masyarakat umum dapat mengetahui kinerja pemerintah khususnya di bidang keuangan. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan untuk mengetahui

kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, kinerja keuangan daerah ini dapat dilihat dari laporan pertanggungjawaban pemerintah berupa realisasi anggaran.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Propinsi Banten.

### **Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan di pemerintah propinsi Banten.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari empat komponen yaitu:

#### **1. Pajak daerah**

Menurut UU no 28 Tahun 2009 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun jenis pajak daerah terbagi dua yaitu

##### **(1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:**

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

##### **(2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:**

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### **2. Retribusi daerah**

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek Retribusi adalah:

- a. Jasa Umum; (Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; f. Retribusi Pelayanan Pasar; g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
  - b. Jasa Usaha; Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; c. Retribusi Tempat Pelelangan; d. Retribusi Terminal; e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; f. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa; g. Retribusi Rumah Potong Hewan; h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
  - c. Perizinan Tertentu. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Retribusi Izin Gangguan; d. Retribusi Izin Trayek; dan e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.  
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dimaksud antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.
4. Lain-lain PAD yang sah  
Lain-lain PAD yang sah menurut UU No 33 Tahun 2004 Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. jasa giro;
  - c. pendapatan bunga;
  - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
  - e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

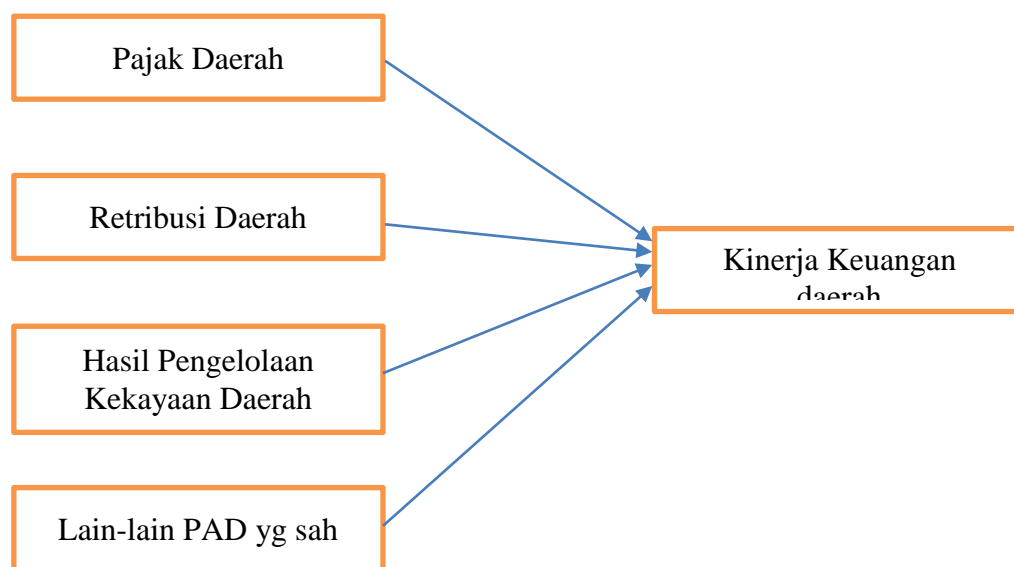
### **Kinerja Keuangan Daerah**

Dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah (UU No.23 Thn 2014). Menurut IAI (2007) Kinerja Keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya. Pengukuran/penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus prestasinya secara objektif dalam suatu periode waktu tertentu (James B. Whittaker: 1995). Menurut peraturan pemerintah RI No.58 tahun 2005 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai

dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Menurut Muindro Renyowijoyo (2013) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku. Halim (2004) menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Di dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian pembiayaan, rasio desentralisasi fiskal dan rasio ketergantungan.

### Kerangka Pemikiran

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Sehingga dengan meningkatnya pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan kinerja keuangan daerah pula.



Gambar 1  
Model Penelitian

### Hipotesis Penelitian

- Pajak Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan
- Retribusi Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah
- Lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat akan meningkatkan kinerja keuangan daerah

### Metode Penelitian

Dalam penelitian ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan variabel independen sedangkan Kinerja Keuangan merupakan variable dependen. Variabel PAD terdiri dari 4 variabel yaitu:

2. Pajak Daerah ( $X_1$ )
3. Retribusi Daerah ( $X_2$ )
4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah ( $X_3$ )
5. Lain-lain PAD yang sah ( $X_4$ )

Sedangkan variabel kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan rasio desentralisasi Fiskal yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan, rasio ini dapat diukur dengan cara berikut:

$$= \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah pemerintah daerah yang ada di propinsi Banten. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan *non probability sampling* dengan menggunakan sampel jenuh. Sampel dalam penelitian ini adalah populasi yaitu seluruh pemerintah kabupaten/kota yang ada di propinsi Banten yaitu 4 pemerintah daerah kabupaten, 4 pemerintah daerah kota dan 1 pemerintah daerah propinsi.

Tabel 1  
Sampel Penelitian

No	Pemerintahan Daerah
1	Kabupaten Serang
2	Kabupaten Tangerang
3	Kabupaten Lebak
4	Kabupaten Pandeglang
5	Kota Serang
6	Kota Tangerang
7	Kota Tangerang Selatan
8	Kota Cilegon
9	Propinsi Banten

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yaitu dari dirjen perimbangan keuangan (<http://www.djpk.depkeu.go.id/>), data yang digunakan adalah data tahun 2012 – 2015.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan menggunakan alat uji *software* SPSS.

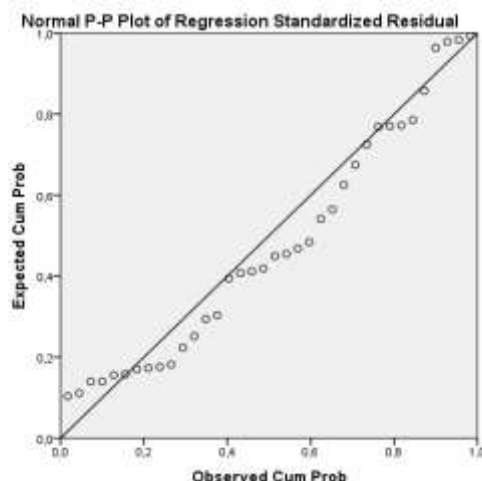
Metode pengujian data dengan menggunakan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas) dan uji hipotesis (uji t, uji F dan koefesien determinasi)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Uji normalitas

Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan normal probability plot, dari hasil pengujian didapatkan gambar dibawah ini terlihat bahwa data residual terdistribusi normal karena penyebaran titik-titik berada disekitar garis diagonal.



Gambar 2  
Normal P-Plot

#### Uji Multikolinearitas

Dari tabel dibawah didapat bahwa tidak ada variabel yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0.10 sehingga tdk ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. tidak ada variabel yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 sehingga dapat dikatakan tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi

Tabel 2  
Hasil Uji Multikolinearitas  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 PJK	,292	3,420
RET	,872	1,147
KKYAN	,289	3,465
LLPAD	,615	1,625

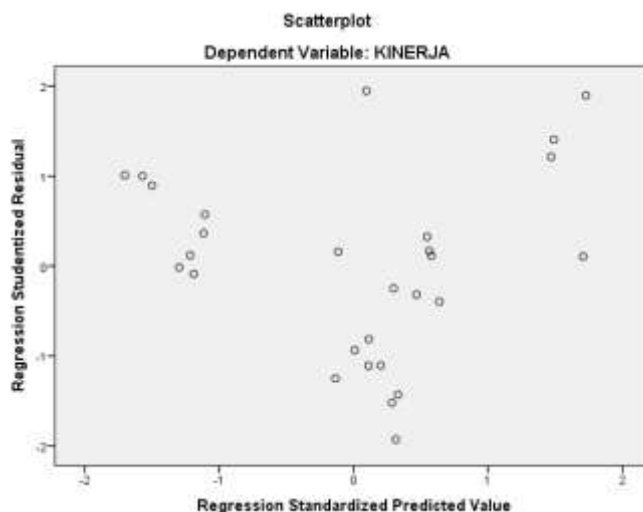
a. Dependent Variable: KINERJA

#### Uji Heterokedastisitas

Titik-titik pada grafik *Scatterplot* di bawah ini menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada

model regresi, maka data yang kita gunakan memenuhi syarat untuk melakukan regresi berganda.

Gambar 3  
Hasil Uji Heterokedastisitas



### Uji Hipotesis

Tabel 3  
Hasil Uji Hipotesis  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,259	,522		-2,412	,024
PJK	2,376	,473	,776	5,023	,000
RET	-,817	,461	-,158	-1,770	,040
KKYAN	,756	,892	,132	,848	,405
LLPAD	-,127	,428	-,031	-,296	,770

a. Dependent Variable: KINERJA

Dari hasil output spss diatas dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

- Variabel Pajak Daerah memiliki nilai nilai signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05. Hal ini dapat disimpulkan  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima yaitu Pajak Daerah berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah.
- Variabel Retribusi Daerah memiliki nilai signifikansi 0.040 lebih kecil dari 0.05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima artinya Retribusi Daerah berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah.
- Variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah memiliki nilai nilai signifikansi 0.405 artinya  $0.405 > 0.05$ . Hal ini dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan menolak  $H_1$  yang artinya Hasil Pengelolaan kekayaan daerah tidak berpengaruh pada kinerja keuangan daerah.

- Variabel Lain-Lain Pendapatan asli daerah memiliki nilai nilai signifikansi 0.770 lebih besar dari 0.05. hal ini dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak artinya lain-lain pendapatan asli daerah tidak berpengaruh pada kinerja keuangan daerah.

Persamaan Regresi

$$Y = -1.259 + 2.376X_1 - 0.817X_2 + 0.756X_3 - 0.127X_4$$

### Uji F (Uji Simultan)

Tabel Uji F' menunjukan bahwa nilai (sig) 0.002 atau dapat nilai signifikansi 0.00 lebih kecil dari nilai probabilitas 0.05 yang artinya bahwa variable bebas yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah secara bersama mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah

Tabel 4  
Hasil Uji F  
ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,946	4	,237	30,092	,000 <sup>b</sup>
Residual	,181	23	,008		
Total	1,127	27			

a. Dependent Variable: KINERJA

b. Predictors: (Constant), LLPAD, RET, PJK, KKYAN

### Koefesien Determinasi

Tabel 5  
Hasil Uji Koefesien Determinasi  
Model Summary<sup>b</sup>

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,932 <sup>a</sup>	,869	,846	,08021

a. Predictors: (Constant), LLPAD, RET, PJK, KKYAN

b. Dependent Variable: KINERJA

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.869 menyatakan bahwa 84.6% kinerja keuangan dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah sisanya 15.4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti

### Pembahasan

Pemerintah Daerah di propinsi Banten terdiri dari 8 pemerintah daerah kabupaten/kota dan 1 pemerintah daerah propinsi, dari 9 pemerintah daerah yang ada di propinsi Banten yang memiliki kontribusi pendapatan asli daerah terbesar terhadap penerimaan daerah yaitu pemerintah daerah propinsi Banten yaitu rata-rata selama 4 tahun (2012-2015) sebesar 69%. Kontribusi PAD nya yang paling kecil terhadap penerimaan yaitu pemerintah daerah Kota Serang selama 4 tahun rata-ratanya yaitu sebesar 5%. Dari hasil pengamatan selama 2012-2015 di 9 pemerintah daerah di propinsi Banten, Pendapatan Asli Daerah yang paling tinggi yaitu pada tahun 2015 di Propinsi Banten sebesar Rp.5.133.482.000.000. Pendapatan Asli daerah yang paling kecil selama 2012-2015 yaitu sebesar Rp.36.516.000.000 pada tahun 2012 di kota Serang.



Pemerintah daerah yang memiliki Kinerja keuangan yang paling tinggi yaitu propinsi Banten dengan pesentase 68.86% selama 4 tahun (2012-2015), sedangkan pemerintah daerah yang memiliki kinerja keuangan yang paling rendah yaitu kota Serang sebesar 0.05%. Kinerja keuangan yang paling tinggi selama tahun 2012-2015 yang paling besar yaitu pada tahun 2012 di Propinsi Banten yaitu sebesar 76.41%, sedangkan kinerja keuangan yang paling kecil yaitu kota Serang pada tahun 2014 sebesar 0.02%. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan cara rasio antara pendapatan asli daerah dan total penerimaan daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin meningkat pendapatan daerah akan meningkatkan kinerja keuangan.

Dari hasil uji spss menyatakan bahwa Pajak Daerah dan retribusi daerah di propinsi Banten berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerahnya sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di propinsi Banten tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Pajak daerah di propinsi memiliki kontribusi terbesar untuk Pendapatan asli daerah, dari hasil penelitian ini Pajak dan retribusi daerah memiliki pengaruh dalam kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga besar kecilnya penerimaan pajak dan retribusi daerah di propinsi Banten akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Sedangkan besar kecilnya hasil Penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak akan mempengaruhi nilai kinerja keuangan daerah. Secara simultan pendapatan asli daerah di Propinsi Banten mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 84.6% sisanya 15.4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## **Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian ini, ada beberapa yang dapat disimpulkan

1. Pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di propinsi Banten
2. Hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di propinsi Banten
3. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah secara bersama-sama mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Propinsi Banten sebesar 84.6%

### **Saran**

Adapun Saran yang diberikan oleh penulis untuk peneliti selanjutnya dan pemerintah daerah yaitu sebagai berikut

1. Bagi peneliti selanjutnya
  - Menambah variabel selain PAD untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah
  - Menggunakan metode pengukuran kinerja selain menggunakan rasio desentralisasi fiskal sebagai bahan perbandingan
2. Bagi Pemerintah Daerah di Propinsi Banten
 

Pemerintah lebih menekankan pendapatan dari sektor PAD untuk mengurangi ketergantungan dan untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **Referensi**

Abdul Halim, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. “Standar Akuntansi Keuangan”. Jakarta: Salemba Empat.
- Junarwati, Hasan Basri, Syukriy Abdullah, 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2010-2012. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol 6 No 2 Juli 2013 Hlm 186-193. Fakultas Ekonomi Syah Kuala.
- Muindro Renyowijoyo, 2013. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Republik Indonesia, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Whittaker, James, 1995. The Government Performance and Results Act of 1993: A Mandate for strategic planning and performance measurement, educational services institute: Arlington, Virginia
- [www.kabar24.bisnis.com/read/20141202/78/379197/realisasi-pendapatan-banten-rp498-triliun](http://www.kabar24.bisnis.com/read/20141202/78/379197/realisasi-pendapatan-banten-rp498-triliun). Diunduh [25/9/2016]